



BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Pemeringkatan Daya Saing Dengan AHP

Analytical Hierarchy Process atau AHP merupakan salah satu metode yang dipergunakan untuk melakukan pemeringkatan dengan cara melakukan pendalaman dengan para ahli. Untuk melakukan pemeringkatan tentang indikator terpenting bagi daya saing di Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan *indepth interview* dengan berbagai pakar yang memiliki informasi tentang peran berbagai indikator tersebut. Hasil dari wawancara tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1.
Hasil In-depth Interview dengan Para Pakar

No	Kriteria	Skala																		Kriteria Pemandangan
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	KME	1	1	1				1		3		1		1					KE	
2	KME			1	1	1				2		1		3					SDAG	
3	KME			1		1				2				2		3			SDM	
4	KME					3				3				1		1	1		KSP	
5	KME			2		2		2		1		1			1				AP	
6	KE				1	2		1		1		1	1	1		1			SDAG	
7.	KE					1		1		3			2	1		1			SDM	
8.	KE							3		4						2			KSP	
9.	KE			1		1		3	1	2				1					AP	
10.	SDAG					1				4		1		1		2			SDM	
11.	SDAG			1		2		3		1		1		1					KSP	
12.	SDAG			1		1		2		1		2	1	1					AP	
13.	SDM			1		1	2	1		2	2								KSP	
14.	SDM			1		3	1	3		1									AP	
15.	KSP			2		1				3	1	2							AP	

Catatan: KME = Kinerja Makro Ekonomi, KE = Keterbukaan Ekonomi, SDAG = Sumber Daya Alam dan Geografi, SDM = Sumber Daya Manusia, KSP = Kondisi Sosial Politik, AP = Administrasi Pemerintahan.



Masing-masing dari keenam indikator tersebut diperbandingkan dengan yang lainnya. Hasil dari wawancara tersebut kemudian diolah sehingga menghasilkan pairwise comparison matrix sebagai berikut.

Tabel 5.2.
Pairwise Comparison Matrix

	KME	KE	SDAG	SDM	KSP	AP
KME	1	2	1	0.5	1	2
KE	0.5	1	1	0.5	1	2
SDAG	1	1	1	0.5	2	1
SDM	2	2	2	1	2	4
KSP	1	1	0.5	0.5	1	1
AP	0.5	0.5	1	0.25	1	1
Total	6	7.5	6.5	3.25	8	11

Dengan membagi setiap sel dengan total kolom dari sel yang bersangkutan, kita dapatkan angka-angka yang dikumpulkan dalam normalized matrix.

Tabel 5.3.
Normalized Matrix

	KME	KE	SDAG	SDM	KSP	AP	Total	Ar. Mean	Geo. Mean	Consistency Measure
KME	0.17	0.27	0.15	0.15	0.13	0.18	1.05	0.17	0.17	6.22
KE	0.08	0.13	0.15	0.15	0.13	0.18	0.83	0.14	0.13	6.21
SDAG	0.17	0.13	0.15	0.15	0.25	0.09	0.95	0.16	0.15	6.15
SDM	0.33	0.27	0.31	0.31	0.25	0.36	1.83	0.30	0.30	6.21
KSP	0.17	0.13	0.08	0.15	0.13	0.09	0.75	0.12	0.12	6.22
AP	0.08	0.07	0.15	0.08	0.13	0.09	0.60	0.10	0.10	6.18

Kita bisa menghitung total dari setiap indikator secara horizontal, kemudian mencari meannya. Mean dalam hal ini bisa berupa arithmetic mean maupun geometric mean. Mean-mean ini merupakan penentu ranking dari setiap indikator. Semakin besar nilai meannya, semakin tinggi arti pentingnya. Dari tabel tersebut bisa dilihat ranking dari indikator, baik di kolom *arithmetic mean* maupun *geometric mean*, dimana keduanya memberikan ranking yang sama sebagai berikut



Tabel 5.4.
Ranking Indikator berdasarkan nilai mean

Ranking	Kode	Persentase	Indikator
1	SDM	0,302423	Sumber Daya Manusia
2	KME	0,169729	Kinerja Makro ekonomi
3	SDAG	0,151211	Sumber Daya Alam dan Geografi
4	KE	0,134714	Keterbukaan Ekonomi
5	KSP	0,120017	Kondisi Sosial Politik
6	AP	0,100000	Administrasi Pemerintahan

Dari tabel di atas, kita dapatkan peringkat yang menunjukkan arti penting indikator-indikator tersebut terhadap pembangunan di DIY. Peringkat tersebut secara berurutan SDM (Sumber Daya Manusia), KME (Kinerja Makro Ekonomi), SDAG (Sumber Daya Alam dan Geografi), KE (Keterbukaan Ekonomi) KSP (Kondisi Sosial Politik) dan AP (Administrasi Pemerintahan). Hasil tersebut sebenarnya merupakan penilaian para pakar akan arti penting masing-masing indikator untuk keperluan pembangunan di DIY.

Untuk menguji konsistensi hasil kuesioner, dilakukan uji konsistensi dengan mencari nilai Consistency Ratio (CR) dengan rumus sebagai berikut:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Dimana CI adalah consistency index dan RI adalah Random Index. CI bisa dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$CI = \frac{\text{mean}(\text{Consistency measure}) - n}{n - 1}$$

Untuk kasus dalam kajian ini, $CI = [6,198-6]/5 = 0,04$. RI bisa dicari dari tabel yang sudah dihitung oleh Saaty. Untuk matrix berukuran 6 x 6, maka $n = 6$, dan $RI = 1.24$.

Dengan demikian, bisa dihitung bahwa $CR = 0,04/1.24 = 0,03$. Karena 0,03 kurang dari 0,10, maka bisa dikatakan bahwa data yang diolah adalah konsisten.



Seterusnya, dari enam urutan ranking indikator tersebut, akan diambil tiga indikator dengan ranking tertinggi, yakni SDM (Sumber Daya Manusia), KME (Kinerja Makro Ekonomi), dan SDAG (Sumber Daya Alam dan Geografi). Tiga indikator tersebut merupakan tiga indikator terpenting dan dominan, karena total dari tiga indikator tersebut adalah 63%. Selanjutnya, daya saing DIY akan menguat manakala bisa memfokuskan pada pembangunan dengan dasar tiga indikator tersebut.

5.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Analisis AHP menunjukkan bahwa SDM merupakan faktor penentuan daya saing daerah yang memiliki peringkat tertinggi dan mendominasi peran penting secara relatif dibandingkan faktor-faktor lainnya. Keberadaan kuantitas dan kualitas SDM yang memadai dipercaya dapat menjadi faktor pendorong aktivitas perekonomian daerah. Pemetaan variabel pada indikator SDM menunjukkan adanya spektrum kekuatan daya saing antar kabupaten/kota.

Secara kuantitas yang diwakili oleh jumlah penduduk, daya saing tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Sleman yang diikuti oleh Kabupaten Bantul di peringkat kedua dan Gunung Kidul di peringkat ketiga. Keunggulan daya saing jumlah penduduk didukung dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tertinggi di kedua daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak tersebut. Tingginya jumlah penduduk mengindikasikan adanya kekuatan jumlah sumber daya manusia yang diindikasikan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif di DIY. Pangsa penduduk tersebut dapat dikerahkan sebagai tenaga kerja yang menjadi daya saing daerah untuk menggerakkan perekonomian.

Jika dilihat menurut partisipasi angkatan kerjanya dan menurut kabupaten/kota, TPAK di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini karena di dua kabupaten tersebut tenaga kerja sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut sangat tergantung pada musim dan pola garapan, sehingga TPAK sangat berfluktuasi. Pada saat musim tanam atau panen memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak daripada pada masa garapan yang lain. Sementara di kabupaten lain tidak banyak berubah, meskipun di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terdapat



Analisis Daya Saing Daerah

kecenderungan penurunan nilai TPAK. Pengangguran pun paling banyak terjadi di dua daerah tersebut.

Dari sisi kualitas SDM, kekuatan daya saing pada indikator daya saing umum pada sisi kesejahteraan sosial dapat diindikasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Daya saing DIY secara umum meningkat seiring dengan meningkatnya IPM namun masih ada ketimpangan daya saing dari sisi kualitas SDM tersebut di antara kabupaten/kota. Peringkat IPM Kota Yogyakarta selalu menempati posisi pertama atau nilainya terbesar jika dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY. Kabupaten Sleman menempati peringkat kedua. Hal itu menunjukkan bahwa daya saing di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta relatif lebih unggul dibandingkan kabupaten lainnya. Gunung Kidul adalah daerah yang memiliki keunggulan daya saing relatif paling kecil.

Pada ukuran kualitas lainnya, kondisi pendidikan dan kesehatan penduduk daerah. Kondisi kualitas dari sisi pendidikan antar kabupaten/kota menunjukkan adanya ketidakmerataan. Jika diukur dalam APK dan APM, peringkat keunggulan daya saing pada indikator SDM menunjukkan kondisi yang bervariasi. Pada jenjang setingkat SD, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mempunyai keunggulan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Sementara untuk jenjang yang lebih tinggi, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo memiliki keunggulan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

Ketimpangan kondisi kesehatan antara kabupaten/kota se DIY menunjukkan adanya perbedaan kekuatan daya saing antar daerah tersebut. Salah satu indikator kesehatan yaitu usia harapan hidup menunjukkan bahwa kualitas daya saing SDM yang paling tinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta yang diikuti oleh Kabupaten Sleman. Daya saing terendah dicapai oleh Kabupaten Gunung Kidul. Pada indikator kondisi kesehatan yang didukung oleh data pelayanan kesehatan yang terdiri dari jumlah rumah sakit dan jumlah tempat tidur di rumah sakit. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki keunggulan daya saing dari sisi kesehatan.

Secara umum, peringkat di kabupaten/kota dalam variabel-variabel yang termasuk dalam indikator Sumber Daya Manusia bisa dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 5.5.
Sumber Daya Manusia di Kabupaten/kota dan Peringkatnya

Indikator	Kulonprogo	Bantul	GK	Sleman	Kota	DIY
Usia harapan hidup (Tahun)	74,185	71,24	70,9125	74,8525	73,385	73,19
Peringkat	2	4	5	1	3	
TPAK (%)	71,42	69,795	73,85	67,55	67,615	
Peringkat	2	3	1	5	4	
Tk. Pengangguran Terbuka (%)	3,235	3,7	1,945	5,335	5,3	
Peringkat	2	3	1	5	4	
APM SD/MI/Paket A (%)	91,336	92,03	88,632	101,176	122,048	97,364
Peringkat	4	3	5	2	1	
APK SD/MI/Paket A (%)	106,65	105,094	100,162	116,688	139,428	111,702
Peringkat	3	4	5	2	1	
APM SMP/MTs/Paket B (%)	86,172	73,122	76,032	81,382	99,752	81,882
Peringkat	2	5	4	3	1	
APM SMP/MTs/Paket B (%)	119,702	106,742	109,356	114,214	136,396	115,516
Peringkat	2	5	4	3	1	
APM SMP/MTs/Paket B (%)	65,556	56,286	52,59	53,75	91,556	61,78
Peringkat	2	3	5	4	1	
IPM (%)	74,14	74,18	70,37	77,98	79,41	75,55
Peringkat	4	3	5	2	1	
Jumlah Penduduk (orang)	390.207	921.263	677.998	1.107.304	390.553	3.487.325
Peringkat	4	3	5	1	2	
JumlahTempat Tidur Klas 3 (buah)	201	415	109	931	682	2.338
Peringkat	4	3	5	1	2	
Jumlah Hari Perawatan (orang)	32.933	158.445	59.471	332.592	361.072	944.513
Peringkat	5	3	4	2	1	
Bed Occupancy Ratio (BOR) (%)	0,182	0,533	0,627	0,547	0,508	0,483
Peringkat	5	3	1	2	4	

Catatan: Angka-angka dalam setiap variabel dihitung dari rerata berbagai tahun yang telah ditampilkan di Bab 4.

Sumber: Data Diolah.

Pentingnya SDM dalam pembangunan sebagai faktor daya saing telah menjadi fokus dalam strategi pembangunan. Hal ini tercermin dari amanat dokumen perencanaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota se DIY sebagai berikut ini:



1. RPJMD DIY 2012 – 2017 mengamanatkan misi pertama pembangunan berupa Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang dijabarkan tujuannya yang terkait dengan indikator daya saing yaitu Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter dan Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. Misi Pertama RPJMD dilaksanakan dengan beberapa strategi yang terfokus pada pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berbudaya, beradab dan berkualitas. Hal itu ditunjukkan antara lain pada sasaran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Kemudian ditunjukkan pula dalam sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan, perluasan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik, peningkatan fasilitas kesehatan, pengurangan resiko terjadinya penyakit dan peningkatan akses dan mutu kesehatan;
2. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kulonprogo tahun 2011 – 2016, misi terkait dengan pengembangan SDM adalah mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. Pembangunan yang mengusung misi ini dimaknai dengan menempatkan sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
3. RPJMD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010 – 2015 merumuskan visi pembangunan sebagai Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera. Kondisi “Maju” dari aspek sosial dimaknai dengan masyarakat yang maju dengan kualitas sumber daya manusianya, yang diindikasikan dengan semakin tinggi tingkat



pendidikan penduduknya, masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Lebih jauh amanat pembangunan terkait pengembangan SDM dinyatakan dalam misi Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli adalah upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan. Adapun strategi yang ditempuh adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, berintegritas, religius, profesional, dan peduli dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang sinergi dengan perguruan tinggi, swasta (dunia usaha) dan masyarakat serta responsif gender;

4. Cita-cita yang ingin dicapai Kabupaten Sleman sesuai RPJMD 2010 – 2015 adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”. Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang lebih sehat, cerdas dan berkemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya dengan baik. Kondisi yang lebih baik itu dinyatakan dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun sebelumnya adalah 78 diharapkan menjadi 80 pada akhir tahun 2015. Adapun misi pembangunan terkait adalah Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan misi tersebut antara lain adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan sasaran antara lain”

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan



- 2) Meningkatnya derajat kesehatan
- 3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;
- 5. Misi 2 Kabupaten Bantul dalam RPJMD 2011 - 2015 menetapkan Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi tersebut dijalankan dengan strategi antara lain Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan RS, Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat. Serta Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan, dengan melalui kebijakan antara lain: Meningkatkan kualitas sarpras, SDM & mutu pelayanan, Meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat, Meningkatkan kualitas pendidikan & peran aktif masyarakat di bidang pendidikan dan Meningkatkan Kualitas Sarpras Pendidikan;
- 6. RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 mengamanatkan bahwa dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 menempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yang salah satunya terkait dengan pembangunan SDM yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas yang dijabarkan dalam pokok-pokok sebagai berikut:
 - a) Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif)
 - b) Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat
 - c) Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh warga Yogyakarta termasuk warga yang mempunyai perbedaan kemampuan (difabel)

Bahkan secara eksplisit Kota Yogyakarta mengamanatkan misi lain yaitu Mewujudkan daya saing daerah yang kuat dengan tujuan pembangunan Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Komitmen pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terhadap pembangunan SDM landasan bagi pelaksanaan pembangunan guna memperbaiki kinerja beberapa variabel SDM yang akan meningkatkan daya saing daerah.

**5.3. Indikator Perekonomian Daerah Secara Makro**

Indikator kinerja secara umum perekonomian daerah secara makro adalah kekuatan daya saing peringkat dua yang mempunyai peran penting dalam penentuan daya saing DIY. Indikator kinerja secara makro menunjukkan potensi aktivitas ekonomi daerah yang memberikan gambaran tentang kekuatan dan daya saing ekonomi daerah. Potensi makro ekonomi antar kabupaten dan kota DIY tidak merata yang menggambarkan daya saing antara daerah tersebut berbeda. Ketimpangan indikator perekonomian ditunjukkan dengan ketimpangan beberapa variabel yang diteliti pada Bab IV. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mendominasi kepemilikan tertinggi atas beberapa kinerja makro ekonomi yang menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki potensi daya saing yang lebih tinggi dibanding tiga kabupaten lainnya. Sementara itu daerah yang berada pada posisi tengah dalam rangking kekuatan makro ekonomi adalah Kabupaten Bantul seperti pada indikator PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Investasi. Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul berada dalam posisi terbawah pada sebagian besar indikator seperti PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Investasi.

Tabel 5.6.
Kinerja Makro Ekonomi di Kabupaten Kota dan Peringkatnya

Indikator	Kulonprogo	Bantul	GK	Sleman	Kota
PDRB Harga Konstan (juta rupiah)	1.963.028	4.400.313	3.642.562	7.069.229	6.151.679
Ranking	5	3	4	1	2
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,34	5,094	4,37	5,058	5,266
Ranking	5	2	4	3	1
Pendapatan Per kapita (rupiah)	4.534.6845	4.293.462	4.856.166	5.793.254.3	13.997.182
Ranking	4	5	3	2	1
Nilai Investasi (juta rupiah)	52.678,4	288.803,4	88.755,8	2.560.355,4	2.344.037,6
Ranking	5	3	4	1	2
Tabungan (milyar rupiah)	587,2	895	456,2	2.548	8.434,4
Ranking	4	3	5	2	1



Analisis Daya Saing Daerah

Indikator	Kulonprogo	Bantul	GK	Sleman	Kota
Pengeluaran Rumah Tangga Per kapita (rupiah)	2.240.106	1.920.157,8	1.991.730,6	2.533.358	4.991.702,4
Ranking	3	5	4	2	1

Catatan: Angka-angka dalam setiap variabel dihitung dari rerata berbagai tahun yang telah ditampilkan di Bab 4.

Sumber: Data Diolah.

Peringkat pertama sebagai daya dukung daya saing mengindikasikan bahwa pembangunan dengan fokus peningkatan kinerja ekonomi makro dapat menjadi upaya signifikan untuk mendorong daya saing DIY. Sementara itu, ketimpangan indikator makro ekonomi antar kabupaten dan kota mengindikasikan adanya kebutuhan untuk pemerataan kemampuan daya saing daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan antara daerah dan meningkatkan kinerja ekonomi dan kesejahteraan seluruh DIY. Analisis dokumen perencanaan pembangunan DIY dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kemampuan daya saing kabupaten dan kota serta DIY secara keseluruhan telah menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Pencermatan terhadap dokumen RPJMD di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. RPJMD DIY 2012 – 2017 mengamanatkan pencapaian Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD tahun 2012-2017 pada Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a) Membangun perekonomian masyarakat melalui peningkatan dari sektor pariwisata dan sektor pendukung, dengan prioritas tahapan pada: Peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukungnya serta Pengembangan usaha pariwisata.
 - b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kerajinan pendukung kegiatan pariwisata seiring dengan adanya peningkatan modal terhadap UKM, dengan prioritas tahapan pada: Peningkatan industri kerajinan pendukung pariwisata dan fasilitasi permodalan bagi UKM.

Target-target tersebut dapat menjadi pandangan pembangunan untuk mewujudkan misi Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. Sasaran pada misi tersebut terkait dengan peningkatan kinerja



- makro ekonomi antara lain peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan ketimpangan antara wilayah dan penurunan kesenjangan pendapatan masyarakat;
2. Pada RPJMD Kabupaten Kulonprogo tahun 2011 – 2016, salah satu misi adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dibutuhkan pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapaun salah satu tujuan adalah meningkatnya kinerja ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat yang dalam hal ini pembangunan di Kulonprogo bertujuan salah satunya untuk memperbaiki kondisi ekonomi makro;
 3. RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 mengamanatkan strategi untuk Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi. Fokusnya adalah menggerakkan perekonomian yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan memperluas lapangan kerja, serta mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pelaksanaan strategi ini diharapkan ekonomi daerah akan tumbuh dan berkembang sehingga kondisi makro ekonomi di Kota Yogyakarta dapat meningkat;
 4. Beberapa indikator ekonomi makro menjadi indikator capaian kinerja pada misi pembangunan Misi tiga, yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2015. Indikator-indikator tersebut adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Meningkatnya penanaman modal dan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Menurunnya Disparitas Pendapatan dengan penugasan beberapa instansi yang menangani urusan terkait seperti Disperindagkop, Disbudpar, Dispartan, Perikanan dan Kehutanan serta Dinas Pasar;



5. Kabupaten Gunung Kidul menempatkan Pengembangan perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan tidak hanya pariwisata (tourism), tetapi juga perdagangan (trade) dan investasi (investment) sebagai salah satu prioritas pembangunan jangka menengah sesuai dituangkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015. Pembangunan perekonomian diarahkan untuk memanfaatkan potensi ekonomi terutama terdapat pada sektor-sektor: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan/kelautan; (2) pertambangan; dan (3) Pariwisata. Sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan nilai kontribusi dalam perbandingan antar wilayah sehingga layak untuk terus dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian lokal wilayah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Upaya yang harus dilakukan yaitu: (1) pengembangan industri yang menunjang aspek pertanian sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul serta upaya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak swasta/lainnya; (2) menemukan dan mempromosikan citra komoditi dan produk unggulan daerah sehingga memberikan nilai tambah berupa peningkatan PDRB dan PAD yang bermanfaat bagi masyarakat; (3) menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendukung daerah membangun dengan memperluas kapasitas fiskal daerah dan memperluas basis produktif sektor ekonomi rakyat; dan (3) meningkatkan pengelolaan potensi dan pengembangan daya dukung pariwisata;
6. RPJMD Kabupaten Bantul mengamanatkan salah satu misi pembangunannya adalah Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender. Salah satu tujuan dari misi tersebut adalah Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan. Misi tersebut dilaksanakan dengan berbagai kebijakan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.



Perencanaan yang mensasar peningkatan kinerja makro ekonomi tersebut hendaknya menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan guna memperbaiki performa beberapa variabel makro ekonom yang akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah.

5.4. Sumber Daya Modal Fisik, Letak Geografis, Sumber Daya Alam (SDA)

Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa Ketersediaan sumber daya modal fisik, sumber daya alam dan letak geografis merupakan indikator daya saing yang mempunyai tingkat penting terbesar ketiga. Panjang jalan menunjukkan indikator daya saing meskipun besaran panjang jalan tergantung juga dengan luas daerah yang tidak terkait dengan kapasitas daya saing. Analisis panjang jalan seharusnya dikombinasikan dengan kualitas jalan untuk mencerminkan kapasitas daya saing jalan.

Berdasarkan pada panjang jalan, daerah yang memiliki peringkat tertinggi adalah Kabupaten Sleman dengan panjang jalan stabil sepanjang 1.085,13 km, namun prosentase jalan mantap di Kabupaten termasuk terendah dengan prosentase sebesar rata-rata 69,66%. Kabupaten Bantul mempunyai keunggulan relatif juga dalam hal panjang jalan dengan panjang jalan mendekati 900 km. Kabupaten Kulonprogo dan Bantul menghadapi penurunan kekuatan daya saing karena panjang jalan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan dari tahun 2009 ke tahun 2011 yaitu dari 925,3 km menjadi 763,69 km di Kulonprogo dan dari 899,83 km menjadi 895,73 km di Bantul. Pada sisi kualitas, Kabupaten Kulonprogo memiliki kualitas yang relatif baik dengan prosentase jalan mantap di atas 80%, sedangkan Bantul memiliki jalan mantap sebesar rata-rata kurang dari 75%. Kota Yogyakarta memiliki panjang jalan terpendek namun prosentase jalan mantapnya paling tinggi yaitu rata-rata sebesar 82,08%.

Pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai komitmen pembangunan pada peningkatan daya saing terkait dengan indikator sumber daya modal fisik dengan mengamanatkan peningkatan pembangunan pada sektor terkait dalam dokumen perencanaan pembangunannya. Uraian mengenai komitmen tersebut diuraikan sebagai berikut:



1. RPJMD 2012 – 2017 DIY mengamanatkan salah satu sasaran pokok RPJPD pada periode RPJMD tersebut untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera adalah Memperkuat ekonomi masyarakat melalui investasi, membuka usaha ekonomi produktif pada lokasi industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sementara itu Misi ke-empat RPJMD: Memantapkan prasarana dan sarana daerah mengamanatkan pembangunan infrastuktur. Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah, dimaknai sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Rencana pembangunan Kota Yogyakarta sesuai RPJMD 2012 – 2016 menunjukkan komitmen pembangunan infrastuktur melalui amanat tujuan pembangunan selama lima tahun yang salah satunya adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai. Tujuan tersebut akan dicapai dengan dua strategi yaitu:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan inklusif, dengan arah kebijakan antara lain: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan dan Meningkatkan kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan
 - b. Peningkatan sistem transportasi perkotaan yang dilaksanakan salah satunya dengan arah kebijakannya berupa meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
3. Perencanaan pembangunan lima tahunan yang tersusun dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun mengamanatkan bahwa salah satu misinya adalah Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan



swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik. Adapun tujuan pembangunannya adalah:

- a) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik.
- b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari;

4. Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu faktor penentu daya saing, Kabupaten Gunung Kidul menetapkan salah satu misinya dalam RPJMD 2010 – 2015 adalah Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari. Pemaknaan pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari yaitu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat dan meningkatkan kesadaran semua pihak dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam untuk mendukung perekonomian dengan tetap mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan. Pembangunan ekonomi diupayakan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui pemanfaatan ruang yang serasi untuk kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Adapun salah satu tujuan pembangunan adalah Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang dikaitkan dengan pembangunan yang mendukung pembangunan sektor lainnya diamanatkan dalam sasaran pembangunan yang antara lain:

- a) Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal;
- b) Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal;
- c) Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang handal;
- d) Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi;



- e) Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara dengan infrastruktur minapolitan yang memacu pengembangan kawasan perikanan pantai selatan;
5. Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo pada RPJMD 2011 - 2016 yaitu Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut yang dua diantaranya menunjukkan komitmen untuk membangun aspek SDA dan sumber daya modal fisik yaitu:
- a. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah
 - b. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan

Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah diangkat menjadi misi penting karena. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya kritis yang mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa yang akhirnya secara tidak langsung mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Misi Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan didasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat. Untuk itu, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan;

6. Pembangunan modal fisik dan SDA di Kabupaten Bantul dalam RPJMD 2011 – 2015 dituangkan dalam Strategi dan Arah Kebijakan pada pelaksanaan Misi Keempat yaitu “Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan” yang Strateginya:
- a. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana publik.
 - b. Pengelolaan sumberdaya alam & pelestarian lingkungan.
 - c. Peningkatan penataan lingkungan.



Sementara itu beberapa kebijakan terkaitnya adalah:

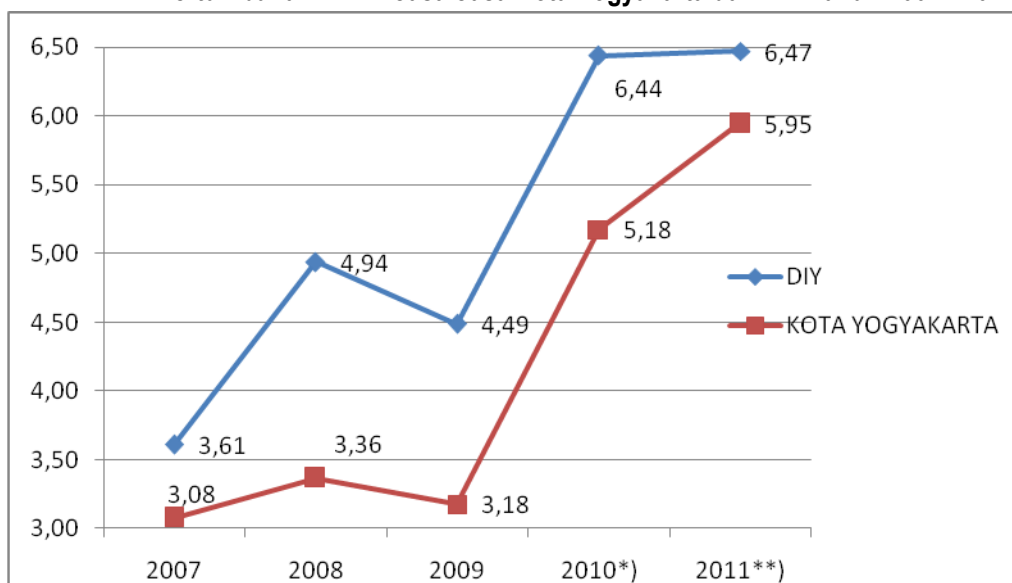
- Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkesinambungan.
- Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam & pelestarian lingkungan hidup.

5.5. Proyeksi Ekonomi Kabupaten dan Kota di DI. Yogyakarta

5.5.1. Kota Yogyakarta

Secara umum, tren pertumbuhan PDRB sektor jasa-jasa di Kota Yogyakarta dan DIY mengalami kenaikan. Pertumbuhan PDRB jasa-jasa Kota Yogyakarta naik dari 3,08% (2007) menjadi 5,95% (2011).

Gambar 5.1
Pertumbuhan PDRB Jasa-Jasa Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007 - 2011

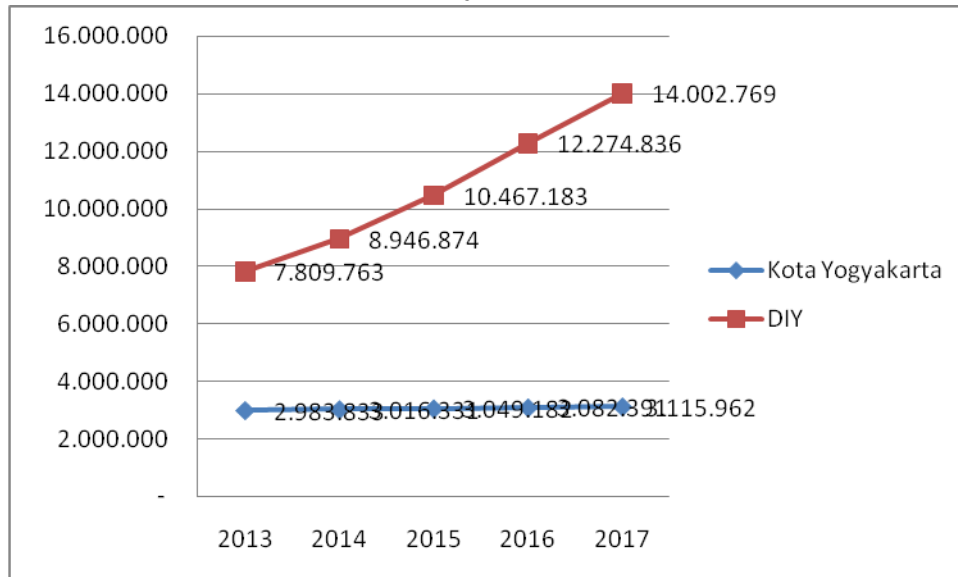


Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Berdasarkan trend realisasi investasi kota Yogyakarta didapati hasil sebagai berikut dimana pada tahun 2017 diharapkan minimal akan mencapai realisasi investasi sebesar 3,1 triliun rupiah. Dimana trend pertumbuhannya positif sejak tahun 2013 sampai pada tahun 2017.



Gambar.5.2
Proyeksi Realisasi Investasi Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2013-2017
dalam juta rupiah



Sumber: Bappeda DIY diolah

Proyeksi target beberapa indikator pembangunan selama tahun 2013 – 2017 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Yogyakarta. IPM diproyeksikan meningkat dari 80,48 di tahun 2013 menjadi 81,70 di tahun 2017. Kemiskinan diproyeksikan turun sekitar 3% dari 10,75% (2013) menjadi 7,69% (2017). Proyeksi pengangguran turun dari 4,87% di tahun 2013 menjadi 2,05% di akhir periode. Sementara itu pertumbuhan ekonomi diproyeksikan senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rangkaian pertumbuhan sebesar 5,8% (2013), 6,0% (2014), 6,2% (2015), 6,4% (2016) dan 6,61% (2017)

Tabel 5.7
Target Pembangunan Kota Yogyakarta 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM (%)	80,48	80,79	81,09	81,40	81,70
2	Kemiskinan (%)	10,75	9,93	9,15	8,40	7,69
3	Tingkat Pengangguran (%)	4,87	4,16	3,46	2,76	2,05
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8	6,0	6,2	6,4	6,61



Arah kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta sebagai satu-satunya Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta letaknya yang menjadi pusat aktivitas utama menjadi sebuah hal penting terutama pengembangan sektor non pertanian (perdagangan, jasa, industri , transportasi & pariwisata). Untuk itu perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya:

1. Berdasarkan capaian PDRB pada tahun 2007 – 2011 bahwa Kota Yogyakarta menjadi urutan teratas sehingga yang perlu ditekankan pada aspek pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Peningkatan pada kualitas hidup yang terukur dari IPM, tingkat kemiskinan dan pengangguran harus dipertahankan serta ditingkatkan dengan kebijakan memperluas aksesibilitas masyarakat pada pelayanan umum, fasilitasi pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta penciptaan peluang usaha pada sektor-sektor utama.
2. Pertumbuhan pada sektor jasa-jasa dimana melampaui DIY pada tahun 2007 -2011 harus dipertahankan dengan kebijakan kemudahan, kecepatan dan ketepatan perizinan bagi pengembangan usaha serta disupport dengan penyediaan sarana-prasarana penunjang usaha khususnya hiburan dan rekreasi yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Kota Yogyakarta.
3. Pertumbuhan pada sektor jasa tidak semulus yang dihadapi pada sektor perdagangan dimana mulai tahun 2009 sampai 2011 trendnya menurun. Hal ini harus disinergikan dengan laju pertumbuhan pada sektor jasa dan pengangkutan yang laju pertumbuhannya positif. Mengingat Kota Yogyakarta sekarang ini yang semakin padat kendaraan sehingga akan mengurangi kenyamanan dalam menikmati dan beraktivitas di Kota Yogyakarta maka kebijakan terpadu dalam sektor pengangkutan dengan sektor lain.
4. Meningkatnya pertumbuhan pada sektor konstruksi di Kota Yogyakarta harus diikuti dengan kebijakan pada penataan ruang secara keseluruhan, ruang terbuka hijau dan keselarasan dengan lingkungan.
5. Sektor pertanian khususnya peternakan ternyata sedang bergeliat di Kota Yogyakarta sejak tahun 2007 – 2011 dimana trendnya positif, hal ini perlu untuk dibarengi dengan

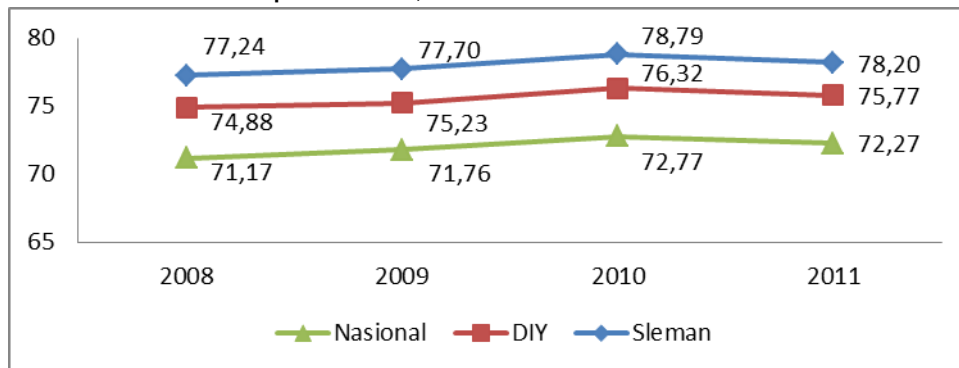


kebijakan pada pengembangan peternakan yang dapat mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat.

5.5.2. Kabupaten Sleman

Sleman merupakan wilayah yang posisinya mayoritas berada dibagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman pada tahun 2011 berpenduduk 1.107.304 orang yang merupakan jumlah penduduk terbesar diantara kabupaten-kota di DIY.

Gambar 5.3
IPM Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2008 – 2011



Sumber: BPS Provinsi DIY (2008-2011) diolah

Kabupaten Sleman untuk IPM sama halnya dengan Kota Yogyakarta juga sudah melampaui target capaian Nasional dan DIY dari tahun 2008–2011 secara konsisten. Seperti pola perkembangan IPM baik di tingkat DIY dan nasional, IPM kabupaten Sleman mengalami kenaikan dari tahun 2008 ke tahun 2010 tapi menurun di tahun 2011.

Posisi kondisi capaian IPM tahun 2011 Kabupaten Sleman pada angka harapan hidup menempati urutan tertinggi diantara kabupaten-kota se-DIY dengan 75,18 tahun. Tiga komponen lain seperti angka melek huruf 93,44 persen, rata-rata lama sekolah 10,51 tahun dan pengeluaran perkapita (PPP) Rp. 650.270,- capaiannya dibawah Kota Yogyakarta. Berkenaan dengan data ini maka arah kebijakan di Kabupaten Sleman diarahkan pada pemerataan, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Peningkatan pada akses, bantuan dan fasilitasi pembelajaran masyarakat untuk mendorong angka melek huruf.



Perkembangan pertumbuhan PDRB pertanian Kota Yogyakarta bergerak seiring dengan pertumbuhan di sektor tersebut pada periode 2007–2011. PDRB pertanian Kota Yogyakarta naik dari -0,13% di tahun 2007 menjadi 6,94 di tahun 2008 yang kemudian terus mengalami penurunan menjadi -2,12% di tahun 2011. Pertumbuhannya di tahun itu masih berada di bawah pertumbuhan di tingkat provinsi sebesar -2,12%.

Pertumbuhan PDRB pertambangan Kabupaten Sleman mengalami penurunan tajam dari 74,60% di tahun 2007 menjadi -7,96% di tahun 2008, yang kemudian mengalami kenaikan terus sampai menjadi 15,24% di tahun 2010. Angka tersebut turun menjadi 14,35% di tahun 2011, namun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan keseluruhan provinsi sebesar 11,96%.

Secara umum, perkembangan pertumbuhan PDRB industri di Kabupaten Sleman menunjukkan kenaikan secara eksponensial. Selama tahun 2007 sampai 2009, perkembangannya mengikuti pola pertumbuhan sektor tersebut secara umum di DIY, namun pada tahun 2010 pertumbuhan sektor itu di Kabupaten Sleman sebesar 3,05% jauh di bawah pertumbuhan regional se-DIY sebesar 7,00%.

Secara umum, pertumbuhan PDRB konstruksi Kabupaten Sleman dan DIY berjalan seiring, di mana terdapat penurunan pertumbuhan pada tahun 2009 dan kemudian naik di tahun berikutnya. Pada akhir periode tingkat pertumbuhan sektor tersebut di Kabupaten Sleman sebesar 6,95% di bawah pertumbuhan keseluruhan DIY sebesar 7,23%.

Pertumbuhan PDRB perdagangan Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhannya di tahun 2007 sebesar 6,97% dan menjadi 6,27% di tahun 2011. Sementara itu pertumbuhannya selalu di atas rata-rata keseluruhan DIY di setiap tahunnya.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman mengalami penurunan dari 7,06% di tahun 2007 menjadi 5,40% di tahun 2008, sedangkan di tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 8,00% di tahun 2011. Angka itu lebih besar dibandingkan rata-rata DIY sebesar 6,61% di tahun yang sama.

Secara umum, pertumbuhan PDRB keuangan Kabupaten Sleman dan DIY menunjukkan tren meningkat selama periode tahun 2007–2011. Pada tahun 2008,



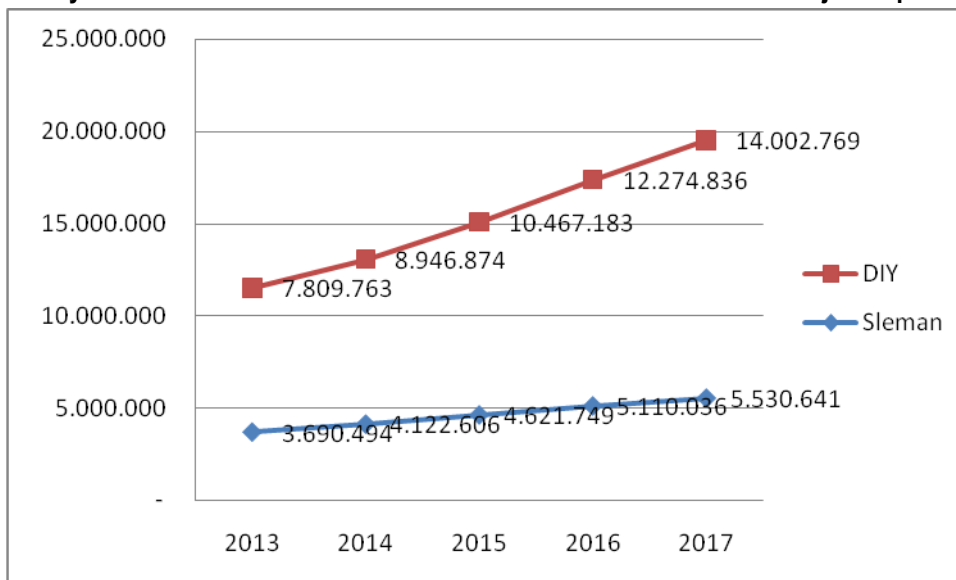
Analisis Daya Saing Daerah

pertumbuhan sektor ini di Kabupaten Sleman meningkat menjadi dari 5,10 (2007) menjadi 5,47% (2008) sedangkan pertumbuhannya di tingkat DIY justru turun dari 6,49% (2007) menjadi 5,82% (2008). Di akhir periode pertumbuhan sektor ini di Kabupaten Sleman sebesar 6,88% masih di bawah pertumbuhannya sebesar 7,95% di tingkat DIY.

Selama periode 2007–2011, pertumbuhan PDRB jasa-jasa mengalami tren menaik. Pertumbuhan PDRB sektor ini di Kabupaten meningkat dari 3,81% (2007) menjadi 6,64% (2011). Angka tersebut di akhir periode lebih tinggi dibandingkan capaian di tingkat 6,47%. Berdasarkan trend realisasi investasi Sleman didapati hasil sebagai berikut dimana pada tahun 2017 diharapkan minimal akan mencapai realisasi investasi sebesar 5,5 triliun rupiah. Dimana trend pertumbuhannya positif sejak tahun 2013 sampai pada tahun 2017.

Gambar.5.4

Proyeksi Realisasi Investasi Sleman dan DIY Tahun 2013-2017 dalam juta rupiah



Sumber: Bappeda DIY diolah



Tabel 5.8
Target Pembangunan Kabupaten Sleman 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM (%)	79,13	79,63	80	80,34	80,70
2	Kemiskinan (%)	17	16	15	13,40	12,20
3	Tingkat Pengangguran (%)	6,80	6,62	6,45	6,31	6,18
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,69	5,86	5,93	6,11	6,15

Di masa mendatang, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman diproyeksikan meningkat, di mana proyeksi beberapa indikator pembangunan selama tahun 2013 – 2017 menunjukkan kinerja pembangunan yang semakin membaik. Proyeksi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan IPM dari 79,13 % (2013) menjadi 80,70 % di akhir periode. Kemiskinan diproyeksikan turun dari 17% (2013) menjadi 12,20% (2017). Proyeksi pengangguran mengalami penurunan dari 6,80% di awal periode menjadi 6,18% di akhir periode. Sementara itu pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat dari 5,69% di tahun 2013 menjadi 6,15% di tahun 2017.

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk Kabupaten Sleman sebagai wilayah paling utara dari DIY dan berhimpitan dengan Kota Yogyakarta serta berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, menjadikan Sleman menjadi pilihan pengembangan perkotaan ke sisi utara yang notabene juga merupakan daerah konservasi tangkapan air (resapan air) serta keberadaan Gunung Merapi yang masih aktif (daerah Rawan Bahaya Gunung Merapi). Pengembangan Sektor Non Pertanian (permukiman & industri), Pengembangan Sektor Perdagangan, Pengembangan Komoditi Hortikultura & Perkebunan, Pengembangan Sektor Pertanian Lahan Kering, Perkebunan dan Hortikultura, pengembangan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan menjadi pilihan arahan pengembangan kewilayahan untuk Kabupaten Sleman. Beberapa arah kebijakan Kabupaten Sleman adalah :

1. Usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya tercermin dari capaian IPM yang posisinya sudah termasuk tinggi dibandingkan dengan DIY dan Nasional selama kurun waktu 2008–2011. Usia harapan hidup menduduki posisi nomor satu untuk wilayah DIY. Namun pada tiga komponen Tiga komponen lain seperti



angka melek huruf 93,44 persen, rata-rata lama sekolah 10,51 tahun dan pengeluaran perkapita (PPP) Rp650.270 capaiannya masih dibawah Kota Yogyakarta. Berkenaan dengan hal ini diperlukan kebijakan pada upaya pemerataan dan peningkatan akses khususnya pendidikan serta kesempatan kerja. Usia harapan hidup yang tinggi juga harus disikapi dengan kebijakan sosial bagi lansia yang ada di wilayah Sleman.

2. Pertanian di wilayah Sleman mengalami trend penurunan laju pertumbuhan yang kian tahun cukup signifikan. Permasalahan mengenai penurunan laju pertumbuhan produktivitas pertanian juga mengenai alih fungsi lahan dan daya dukung lingkungan. Sleman mempunyai hawa dan suasana yang sejuk sehingga menjadi sasaran untuk memiliki property di kawasan ini baik itu masyarakat DIY dan Luar DIY. Fenomena ini harus disikapi dengan kebijakan pro petani dengan fasilitasi dan pengembangan pertanian, konversi lahan pertanian, pengawasan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3. Pertumbuhan pertambangan khususnya penggalian mulai menunjukkan trend positif, berkah bumi dari muntahan Gunung Merapi berupa pasir dan bebatuan harus dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat tanpa mengurangi daya dukung dan kerusakan lingkungan.
4. Pertumbuhan industri di Sleman harus disikapi dengan kebijakan pada penyiapan kapasitas masyarakat agar kesejahteraan masyarakat juga turut meningkat. Kebijakan investasi perlu terus didorong dan dipermudah dengan tetap memperhatikan sektor lainnya seperti ketenagakerjaan dan lingkungan. Pengembangan UKM juga harus didorong untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Sleman khususnya industri pengolahan.

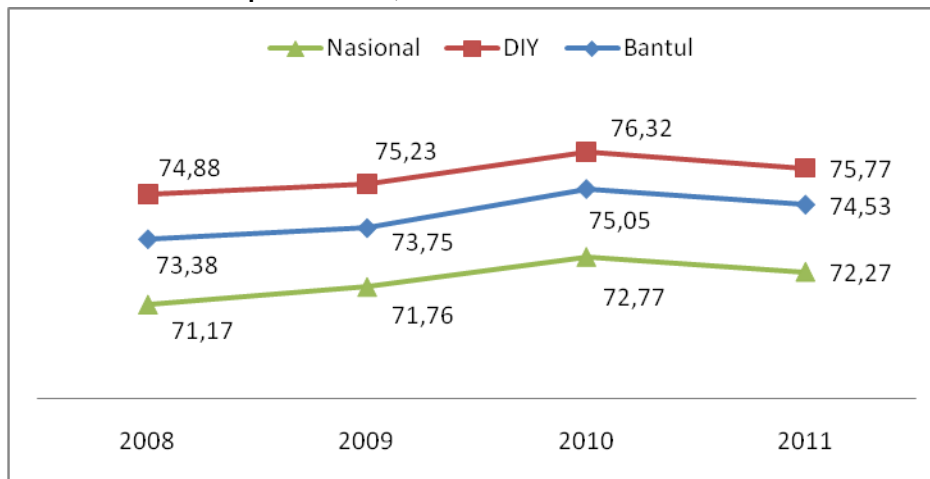
5.5.3. Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul selama 2008 – 2011 capaian IPM sudah diatas capaian Nasional namun masih berada dibawah DIY. Hal ini dikarenakan angka harapan hidup Bantul mencapai 71,33 tahun dan angka melek huruf 91,23 persen dimana kedua indikator tersebut posisinya terbawah kedua setelah Gunungkidul. Rata-rata sekolah posisinya menempati nomor tiga dengan 8,92 tahun setelah Sleman (10.51 tahun) dan Kota Yogyakarta (11.52



tahun). Disisi pengeluaran per kapita bantul menempati urutan kedua teratas setelah Kota Yogyakarta dengan capaian Rp 651.170.

Gambar 5.5
IPM Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2008 – 2011



Sumber: BPS Provinsi DIY (2008-2011) diolah

Secara umum, perkembangan pertumbuhan PDRB pertanian Bantul bergerak seiring perkembangan pertumbuhannya di tingkat DIY. Pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan dari tahun 2007 ke 2008 yang kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2011. Penurunan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul sebesar -1,37% masih lebih rendah dibandingkan penurunan di tingkat DIY sebesar -2,12% di tahun 2011. Pada tahun 2007, 2009 dan 2011, pertumbuhan PDRB pertambangan Bantul berada di atas angka di tingkat DIY. Di akhir periode angkanya sebesar 11,96% berada jauh di atas rata-rata DIY yang sebesar hanya 6,18%.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul sempat mengalami penurunan tajam di tahun 2009, di mana angka pertumbuhan turun dari 8,32% menjadi -0,63%, namun angkanya kembali mengalami kenaikan menjadi 7,14% di tahun 2011. Secara keseluruhan, perkembangan pertumbuhan PDRB konstruksi Kabupaten Bantul berada di bawah DIY selama periode 2007–2011.

Perkembangan pertumbuhan PDRB perdagangan Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 2007–2011 dengan puncak pertumbuhan tertinggi



Analisis Daya Saing Daerah

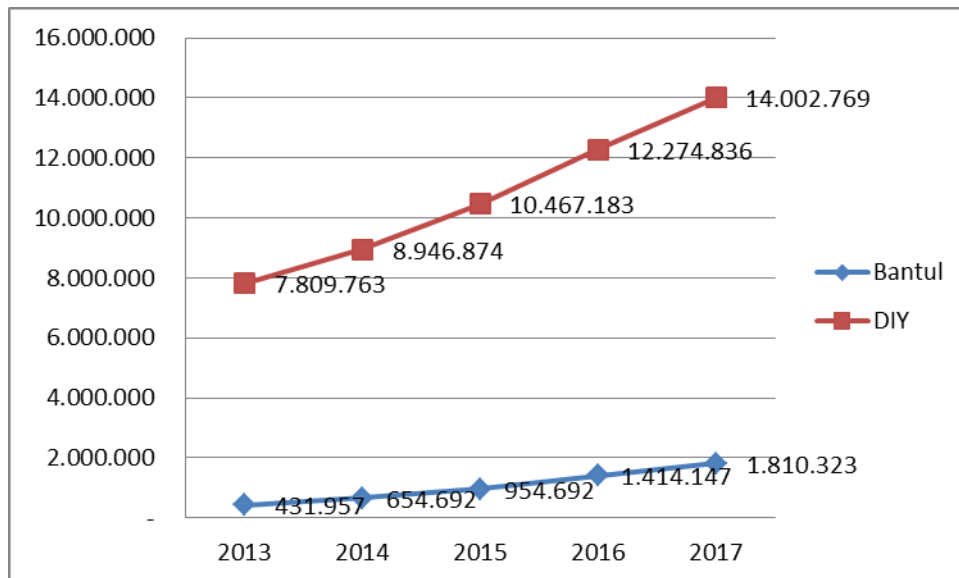
pada tahun 2008 sebesar 6,51%. Selama periode tersebut, pertumbuhan PDRB sektor tersebut selalu berada di atas angka rata-rata DIY.

Pertumbuhan PDRB pengangkutan Kabupaten Bantul mengalami perkembangan fluktuatif selama periode 2007–2011. Pertumbuhannya mengalami penurunan pada tahun 2008 (5,95%) dan 2010 (7,12%) di banding periode satu tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi tahun 2009 (7,78%) dan 2011 (8,37%). Di akhir periode pertumbuhan sektor ini di Kabupaten Bantul sebesar 8,37% berada di atas rata-rata DIY sebesar 8,00%.

Pertumbuhan PDRB Keuangan Kabupaten Bantul senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2007–2011. Pertumbuhannya naik dari 4,71% di tahun 2007 menjadi 10,93% di akhir periode. Pada tahun 2011, tingkat pertumbuhannya sebesar 7,70% berada di atas rata-rata DIY sebesar 6,47%.

Proyeksi atas realisasi investasi yang didasarkan pada capaian realisasi pada lima tahun terakhir mendapatkan hasil bahwa laju pertumbuhannya tidak terlalu besar namun memiliki kecenderungan positif. Dimana pada tahun 2017 diharapkan minimal akan mencapai 670, 2 milyar rupiah.

Gambar.5.6
Proyeksi Realisasi Investasi Bantul dan DIY Tahun 2013-2017 dalam juta rupiah



Sumber: Bappeda DIY diolah



Tabel 5.9
Target pembangunan Kabupaten Bantul 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM (%)	75,45	75,65	75,85	76,05	76,25
2	Kemiskinan (%)	15,65	15,15	14,65	14,14	13,64
3	Tingkat Pengangguran (%)	3,45	3,01	2,57	2,13	1,70
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,66	5,9	6,14	6,15	6,20

Dengan mencermati angka target capaian pembangunan Kabupaten Bantul, beberapa indikator pembangunan selama tahun 2013–2017 diproyeksikan mengalami peningkatan. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul. IPM diproyeksikan meningkat dari 75,45 di tahun 2013 meningkat sekitar 0,80 menjadi 76,25 di tahun 2017. Kemiskinan diproyeksikan menurun menjadi 13,64% di tahun 2017 dari 15,65% di tahun 2013. Proyeksi pengangguran mengalami penurunan dari 3,45% di awal periode menjadi 1,70% di akhir periode. Pertumbuhan diproyeksikan senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rangkaian pertumbuhan sebesar 5,66% (2013), 5,9% (2014), 6,14% (2015), 6,15% (2016) dan 6,20 (2017).

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang terletak di sebelah selatan Kota Yogyakarta, dimana merupakan bagian pengembangan perkotaan ke sisi selatan. Bantul mempunyai pantai-pantai yang cukup banyak untuk dikembangkan sebagai pariwisata dan perikanan, namun juga merupakan daerah rawan Bencana gempa Bumi & tsunami. Pengembangan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, Pengembangan sektor pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah, Hortikultura (sayuran) & Pariwisata, Pengembangan industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan menjadi arahan pengembangan kewilayahan. Untuk itu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul diarahkan pada:

1. Melihat pada aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul salah satunya adalah IPM dimana capaiannya masih dibawah DIY walaupun sudah diatas Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut Bantul perlu untuk memperluas aksesibilitas, fasilitasi dan bantuan akan layanan umum seperti pendidikan dan kesehatan.



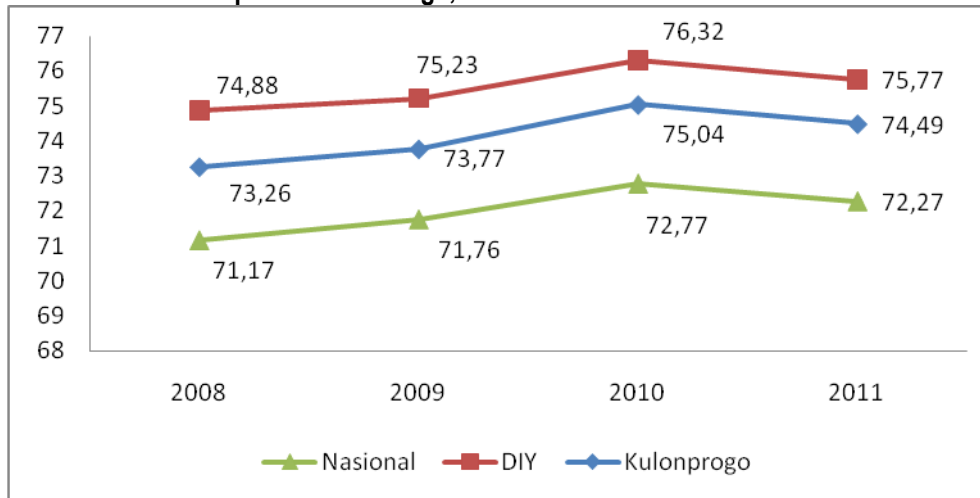
2. Sektor pertanian mengalami penurunan laju pertumbuhan yang sama dengan permasalahan di Sleman selain terkait dengan produktivitas pertanian juga alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, yang sangat terlihat antara lain di Kecamatan Kasihan, Sewon dan Banguntapan. Upaya-upaya kebijakan pengembangan pertanian perlu untuk mendapatkan perhatian antara lain penguatan pertanian melalui penguatan kelembagaan, pengawasan distribusi bibit, pupuk dan keperluan pertanian, jaminan sosial pertanian, usaha-usaha kemandirian petani seperti pembuatan pupuk organik. Kebijakan pengawasan dan pengendalian lahan pertanian menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan untuk segera dilakukan.
3. Bantul dengan laju pertumbuhan penganggkutan dan perdagangan serta disupport dengan laju pertumbuhan keuangan menjadi potensi untuk dapat menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Modal laju pertumbuhan ekonomi Bantul yang tinggi harus dioptimalkan untuk pengembangan pertanian, industry pengolahan dan perdagangan.

5.5.4. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo capaian IPM masih berada di bawah DIY untuk tahun 2008-2011 walaupun sudah diatas capaian nasional. Kondisi atas IPM tahun 2011 angka harapan hidup berada diperingkat kedua dengan 74,48 tahun setelah Sleman, posisi ini juga sudah melebihi capaian dari DIY. Angka melek huruf di Kulon Progo berada di posisi ketiga dengan 92 persen yang melebihi capaian DIY. Namun rata-rata lama sekolah berada diperingkat kedua terbawah setelah Gunungkidul dengan 8,37 tahun, hal ini posisinya sama dengan pengeluaran per kapita (ppp), yaitu Rp. 631.420,-.



Gambar 5.7
IPM Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2008 – 2011



Sumber: BPS Provinsi DIY (2008-2011) diolah

Pada tahun 2007 sampai 2010, pola pergerakan pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Kulon Progo sejalan dengan perkembangan pertumbuhan di tingkat provinsi. Tingkat pertumbuhan di Kabupaten Kulon Progo di tahun 2008 sebesar 7,05% lebih tinggi dibandingkan rata-rata DIY sebesar 5,72%. Sementara itu, pertumbuhannya di tahun 2011 sebesar 5,98% lebih tinggi dibandingkan rata-rata DIY yang justru menurun menjadi -2,12% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan PDRB pertambangan Kulon Progo mengalami kenaikan pada tahun 2009 (8,81%) dan 2011 (21,56%), tapi sempat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2010 menjadi hanya -31,65%. Pada akhir periode pertumbuhan PDRB pertambangan Kabupaten Bantul sebesar 21,56% jauh di atas rata-rata DIY sebesar 11,96%.

Secara umum, perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo sejalan dengan pertumbuhan PDRB se-DIY. Pertumbuhan sektor ini di Kabupaten Kulon Progo tertinggi terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 4,08% yang berada jauh di bawah rata-rata DIY sebesar 7,00%. Angka itu semakin turun drastis di tahun 2011 menjadi -1,235 yang berada jauh di bawah rata-rata DIY sebesar 6,79% yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan PDRB konstruksi Kulon Progo mengalami penurunan pada periode 2007 – 2009 dari 7,30% menjadi 4,50% dan angkanya selalu di bawah rata-rata DIY sebesar



9,66% (2007) sampai 4,64% (2009). Setelah 2009, pertumbuhannya di Kulon Progo dan DIY sama-sama mengalami kenaikan dengan kenaikan di Kulon Progo lebih tinggi dibandingkan rata-rata DIY dengan tingkat pertumbuhan di akhir periode sebesar 9,82%.

Pertumbuhan PDRB perdagangan Kulon Progo mengalami penurunan pada tahun 2007 sampai tahun 2009 yaitu dari 6,26% (2007) menjadi 4,32% (2009). Pada periode sesudahnya, pertumbuhannya mengalami kenaikan menjadi 4,66% (2010) dan 7,34% (2011) yang bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata DIY sebesar 5,19% di tahun 2011.

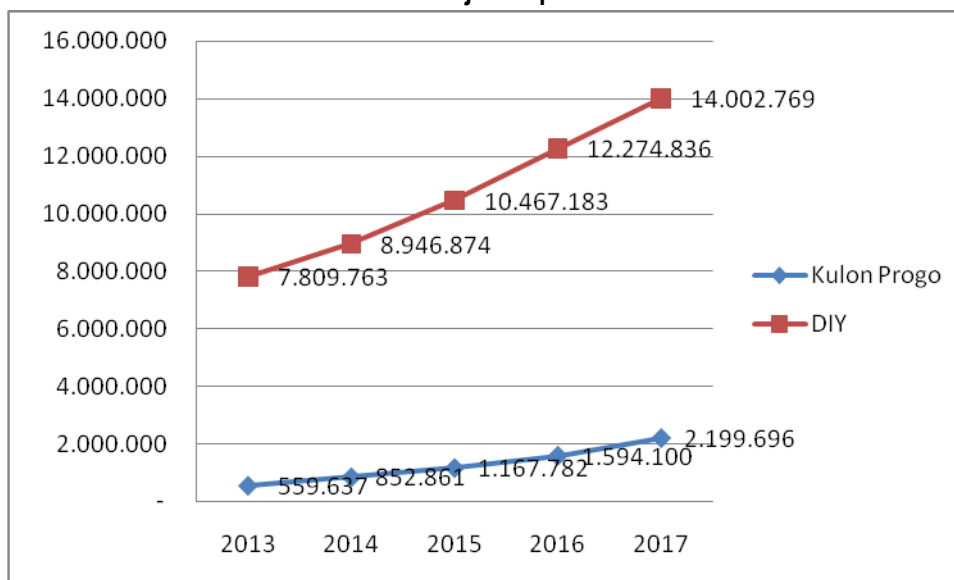
Secara umum, pertumbuhan PDRB pengangkutan Kulon Progo selalu berada di bawah rata-rata DIY sepanjang periode 2007–2011, bahkan tingkat pertumbuhan PDRB Kulon Progo terus mengalami penurunan di tahun 2010 dan 2011 yang semakin tertinggal pada akhir periode. Di tahun 2011, tingkat pertumbuhannya adalah 2,35% yang berada jauh di bawah rata-rata DIY sebesar 8,00%.

Keadaan sektor keuangan Kulon Progo jauh berbeda dengan perkembangan sektor tersebut di seluruh DIY. Pertumbuhan keuangan DIY relatif mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan keuangan Kulon Progo mengalami fluktuasi. Pada akhir periode, pertumbuhan sektor keuangan Kulon Progo semakin menurun mencapai 0,86% yang di bawah rata-rata DIY yang sebesar 7,95%.

Secara umum, perkembangan pertumbuhan PDRB jasa-jasa baik di tingkat Kabupaten Kulon Progo maupun DIY menunjukkan pola yang sama. Peningkatan tajam ditunjukkan kinerja pertumbuhan PDRB jasa-jasa Kulon Progo yang naik dari 1,96% (2009) menjadi 7,99 (2010). Di akhir periode, tingkat pertumbuhan Kulon Progo sebesar 7,36% di atas rata-rata DIY yang sebesar 6,47%.



Gambar.5.8
Proyeksi Realisasi Investasi Kulon Progo dan DIY Tahun 2013-2017
dalam juta rupiah



Sumber: Bappeda DIY

Proyeksi realisasi investasi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 diharapkan mencapai 2,1 trilyun rupiah. Trend kecenderungan tahun 2013 sampai 2017 meningkat secara positif setiap tahunnya.

Tabel 5.10
Target pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM (%)	75,829	76,253	76,677	77,101	77,525
2	Kemiskinan (%)	20,73	19,23	17,73	16,23	14,73
3	Tingkat Pengangguran (%)	2,56	2,24	1,93	1,62	1,30
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,12	5,21	5,30	5,39	5,47

Selama lima tahun pada periode 2013 - 2017, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo diproyeksikan mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan target beberapa indikator pembangunan selama periode tersebut. Pada indikator IPM, proyeksi menunjukkan dari 75,83 di awal periode menjadi 77,53 di akhir periode. Prosentase



warga miskin diproyeksikan turun dari 20,73% (2013) menjadi 14,73% (2017). Proyeksi tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 2,56% di awal periode menjadi 1,30% di akhir periode. Sementara itu pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat dari 5,12% di tahun 2013 menjadi 5,47% di tahun 2017.

Kabupaten Kulon Progo dengan kelengkapan potensinya berupa perkebunan, pantai dan merupakan daerah lalu lintas utama memasuki DIY dari sisi sebelah barat menjadikan potensi untuk pengembangan pembangunan, disamping daerah rawan Longsor, Banjir dan Erosi. Pengembangan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, Pengembangan sektor perkebunan, hortikultura & perkebunan, Pengembangan sektor pertanian Tanaman Pangan, Perikanan (darat & laut), Pengembangan industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan adalah arahan pengembangan wilayah Kulon Progo. Untuk itu arah kebijakan pembangunannya adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo untuk saat ini masih relative rendah dibandingkan dengan Kabupaten-Kota lainnya. Sektor-sektor yang cukup berkembang diantaranya adalah pertambangan dan pertanian, dikala kabupaten-kota lainnya laju pertumbuhan pertaniannya menurun Kulon Progo justru menunjukkan trend positif. Hal ini perlu untuk disikapi dengan kebijakan pengembangan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta support dengan sektor perdagangan yang sudah termasuk tinggi. Kebijakan pada sektor pengangkutan juga harus menjadi perhatian dimana sebagai *show window* DIY dari sisi sebelah barat laju pertumbuhannya dirasa masih kecil.
2. Pengembangan kawasan-kawasan industri perlu segera digairahkan untuk mendorong sektor-sektor lain dan mendorong laju perekonomian. Mengingat sektor industri di wilayah ini laju pertumbuhannya cukup kecil. Sektor konstruksi cukup hamper sama dengan fluktuatifnya trend pertumbuhan ekonomi dan Pengembangan sektor industri. Pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Kulon Progo diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang terbilang masih tinggi di wilayah Kulon Progo.

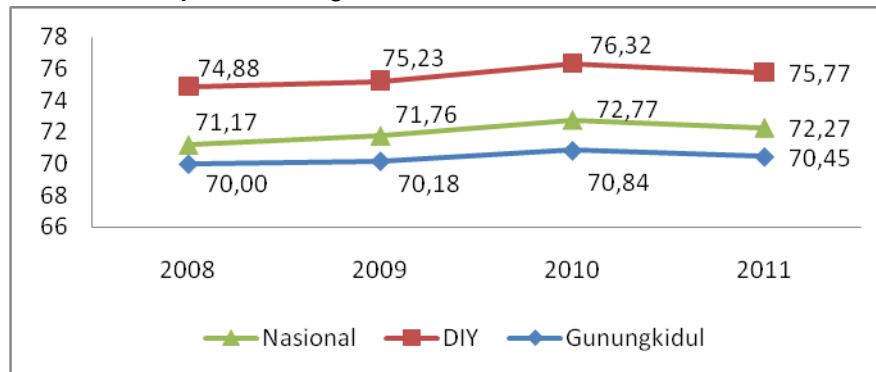


3. Pengembangan pada kesejahteraan masyarakat juga perlu dibarengi selain pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Kabupaten Kulon Progo capaian IPM berada dibawah DIY. Dua hal yang harus menjadi perhatian serius terkait dengan indikator IPM yaitu pada rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kabupaten Kulon Progo perlu mendorong agar masyarakat dapat mengakses tingkat pendidikan yang lebih tinggi diantaranya dengan perluasan aksesibilitas pendidikan dan sarana pendukung pendidikan serta pada upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5.5.5. Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul capaian IPM tahun 2008-2011 mengalami peningkatan namun baik secara Nasional maupun di wilayah DIY capaiannya masih cukup rendah. Perbandingan angka komposit dari indikator IPM tahun 2011 menunjukkan bahwa dari angka harapan hidup (70,01 tahun), angka melek huruf (84,94 persen), rata-rata lama sekolah (7,70 tahun) dan pengeluaran per kapita (ppp) yang mencapai Rp628.730 terendah diantara kabupaten-kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 5.9
IPM Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Nasional Tahun 2008 – 2011



Sumber: BPS Provinsi DIY (2008-2011) diolah

Pada periode 2007–2010, perkembangan pertumbuhan sektor pertanian Gunungkidul relatif searah dengan perkembangannya di tingkat DIY. Capaian pertumbuhan di tingkat Gunungkidul tertinggi terjadi di tahun 2009, yaitu sebesar 5,91%, namun tingkatnya mengalami penurunan tajam di tahun 2010 yang hanya menjadi -0,33%. Di akhir tahun, angkanya meningkat menjadi 0,55% yang berada jauh di atas rata-rata DIY sebesar -2,12%.



Secara umum, pertumbuhan PDRB pertambangan Gunungkidul senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka itu naik dari -1,85% di tahun 2007 menjadi 10,70% di tahun 2011. Angka pertumbuhan yang meningkat itu masih berada di bawah rata-rata DIY yang sebesar 11,96%

Selama periode 2007 sampai dengan 2011, pola perkembangan pertumbuhan PDRB industri Kabupaten Gunungkidul dan rata-rata DIY menunjukkan perkembangan yang relatif sama dengan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2010 dengan puncak peningkatan sebesar 7,97% (Kabupaten Gunungkidul) dan 7,00% (DIY). Sementara itu di akhir periode pertumbuhan PDRB industri Kabupaten Gunungkidul meningkat menjadi 8,19% sementara angka DIY turun menjadi 6,79%.

Secara umum, pertumbuhan PDRB konstruksi Gunungkidul dan DIY mempunyai pola pergerakan yang hampir sama. Puncak penurunan terjadi pada tahun 2009 dengan pertumbuhan sebesar 4,57% untuk DIY dan 4,64 untuk Gunungkidul. Sementara itu, tingkat pertumbuhan PDRB Gunungkidul dan DIY mencapai tingkat pertumbuhan yang sama di tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,23%.

Pada periode 2007 sampai dengan 2011, perkembangan pertumbuhan PDRB perdagangan DIY relatif stabil berkisar 5,06%-5,43%, sementara pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 dan 2010 pertumbuhan sektor tersebut di Gunungkidul lebih tinggi dibandingkan rata-rata DIY sementara di tahun yang lain kondisi menunjukkan keadaan yang sebaliknya.

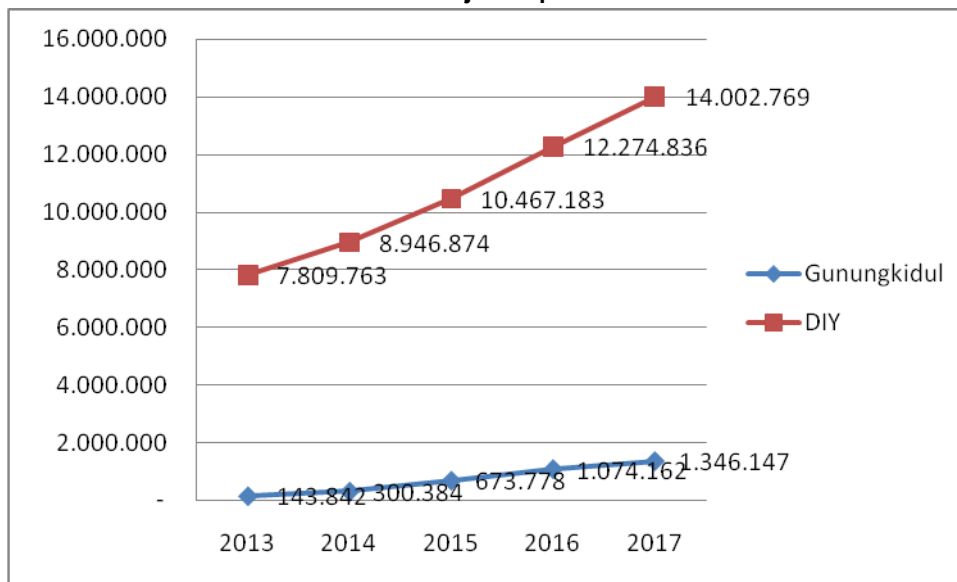
Pertumbuhan PDRB pengangkutan baik di Gunungkidul dan DIY mengalami fluktuasi yang cukup besar pada periode 2007 sampai dengan 2011. Pertumbuhan PDRB pengangkutan Gunungkidul sempat turun drastis menuju angka 2,68% di tahun 2009 dan sempat mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi 6,60%. Sementara itu pada akhir periode pertumbuhan sektor bersangkutan di keseluruhan DIY lebih tinggi dibandingkan Gunungkidul.

Pertumbuhan PDRB keuangan Gunungkidul mengalami penurunan di tahun 2009, namun dapat mengalami kenaikan kembali sampai menuju pertumbuhan tertinggi sebesar 10,33% di tahun 2011. Secara umum, tingkat pertumbuhannya di Gunungkidul lebih tinggi dibandingkan rata-rata DIY kecuali pada saat penurunan tajam di tahun 2009.



Secara umum, pertumbuhan sektor jasa-jasa keuangan Gunungkidul sesuai dengan perkembangannya di tingkat DIY. Penurunan terjadi pada periode 2007 – 2009, di mana pertumbuhannya turun dari 3,62% (2007) menuju titik terendah selama 5 tahun yaitu 2,20% (2009). Setelah penurunan tersebut pertumbuhannya mengalami kenaikan signifikan menjadi 7,34% di tahun berikutnya dan sempat turun kembali menjadi 6,51%. Pada tahun 2010 dan 2011, pertumbuhan jasa-jasa di Gunungkidul tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata DIY.

Gambar 5.10
Proyeksi Realisasi Investasi Gunungkidul dan DIY Tahun 2013-2017
dalam juta rupiah



Sumber: Bappeda DIY

Berdasarkan realisasi investasi kabupaten Gunungkidul dapat disajikan proyeksi realisasi investasi tahun 2013 sampai 2017 yang diharapkan minimal mencapai 203 milyar rupiah.

Sedangkan berdasarkan perbandingan capaian indikator makro pembangunan daerah, dari 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY, antara lain berupa indikator pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB per kapita, dan indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Gunungkidul memiliki angka yang relatif terendah dan angka kemiskinan masih tinggi di DIY.



Tabel 5.11
Target pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM (%)	71,3	71,57	71,83	72,1	72,37
2	Kemiskinan (%)	23,23	22,85	22,47	22,08	21,7
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,87	1,85	1,53	1,22	0,9
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,66	4,78	4,89	5,01	5,12

Target yang diproyeksikan untuk dicapai pada tahun 2013 sampai denan 2017 menunjukkan proyeksi optimis adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul, di mana kinerja pembangunan diproyeksikan semakin membaik. Proyeksi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan IPM dari 71,3 (2013) menjadi 72,37 di akhir periode. Kemiskinan diproyeksikan turun dari 23,23% (2013) menjadi 21,7% (2017). Proyeksi pengangguran mengalami penurunan dari 1,87% di awal periode menjadi 0,9% di akhir periode. Sementara itu pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat dari 4,66% di tahun 2013 menjadi 5,12% di tahun 2017.

Kabupaten Gunungkidul dengan topografi yang berbukit-bukit (Rawan Longsor & Kekeringan) namun tersimpan kekayaan pantai dan suguhan wisata alam yang cukup banyak. Pengembangan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, Pengembangan Sektor Pertanian Lahan Kering, & Peternakan, Pengembangan industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan menjadi pilihan arah pengembangan wilayah. Pengembangan dan pengoptimalan potensi alam menjadikan Gunungkidul saat ini menjadi salah satu tujuan wisata alam favorit wisatawan. Arah kebijakan pembangunan Gunungkidul adalah:

1. Peningkatan derajat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Gunungkidul perlu mendapat perhatian serius, berdasarkan empat indikator IPM pada tahun 2011 bahwa angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita pada posisi terendah di wilayah DIY. Berkaitan dengan capaian IPM maka wilayah Gunung Kidul diarahkan untuk melakukan percepatan dalam:



- a. Peningkatan harapan hidup masyarakat, peningkatan untuk komponen IPM ini dapat disupport antara lain dengan peningkatan pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, bantuan dan jaminan sosial.
 - b. Penurunan Angka Melek Huruf dan peningkatan rata-rata lama bersekolah. Diperlukan kebijakan untuk peningkatan pemerataan pendidikan dengan upaya penguatan pada pelayanan pendidikan formal dan non formal bagi semua kalangan masyarakat. Diperlukan skema-skema bantuan dan fasilitasi pembelajaran bagi masyarakat untuk membantu meningkatkan aksesibilitas belajar.
 - c. Peningkatan pengeluaran riil per kapita. Kebijakannya diarahkan membuat skema pada peningkatan daya saing dan perluasan kesempatan kerja.
2. Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya memiliki trend positif yaitu pada pertanian, keuangan, industri pengolahan dan pertambangan namun ternyata tidak terlalu disupport oleh sektor perdagangan dan pengangkutan. Pengembangan wilayah perlu mendapatkan penekanan kebijakan pada pengangkutan dan perdagangan yang nantinya akan diharapkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor utama yang telah tumbuh seperti pertanian dan industri pengolahan perlu untuk disupport agar memiliki nilai lebih dari produk yang telah dihasilkan tersebut.